

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Pangerang Moenta, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2008
- Andi nova dkk, *Ilmu Negara*, Andalas university press, Padang, 2015.
- C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Carlton Climer Rodee dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Rineka cipta, Jakarta, 1990.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Rajawali pers, Jakarta, 2010.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu perundang-undangan*, Kansius, Yogyakarta, 2007.
- Miriam budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Gramedia pustaka utama, Jakarta
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 2010, Raja grafindo, Jakarta, 1993.
- _____, *Otonomi daerah filosofi, sejarah perkembangan dan problematika*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Peter mahmud marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, , 2013.
- Rozali abdullah, *Pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai suatu alternatif*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Rusdianto sesung, *Hukum Otonomi Daerah*, PT Refika aditama, Bandung, 2013.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Soejono h Abdurrahman, *Metode penelitian hukum*, Pt Renika Cipta, Jakarta, 2003.
- Utang rosidin, *Otonomi daerah desentralisasi*, Pustaka setia, Bandung, 2010.

Yusnani hassymzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, , Rajawali pers , Jakarta, 2017.

Wirjono prodjodikoro, *Azaz-azas hukum tata negara Indonesia*, cet ke-v, Jakarta, 1983

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Undang-Undang Noimor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

C. Putusan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

D. Website

1. <https://m.detik.com/news/berita/d-3238417/Mendagri> -publikasikan-3143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah, pada tanggal 11 mei 2019 pukul 10:40
2. <https://tirto.id/perda> -bermasalah-batal-demi-investasi-bukan-intoleransi-bx7r/ , pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 10:35
3. [http://leip.or.id/statistik-data-perkara mahkamah-agung](http://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung) pada tanggal 11 mei 2019 pukul 14:36